

Pengaruh Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan Manajemen Berbasis Sekolah terhadap Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong

Rustamadji

STKIP Muhammadiyah Sorong

Email:stkip_muh_sorong@yahoo.co.id

Abstract: This Research is designed to measure the influence between establishing STKIP Muhammadiyah Sorong to the efficacy of Regional Autonomy in case of educational section in Sorong Regency. The Method used in this research is analytic descriptive. The observed population is all academic cavities of STKIP Muhammadiyah Sorong. Principle and teacher, elite figure, and bureaucrat in Sorong Regency. Sample is taken through Stratified Random Sampling that consist 40 people. The data are analyzed by using correlation of regression. The data are presented quantitatively through the table of frequency. While, the data are gathered by using combined techniques as questionnaire, observation, documentation and library study. The first result there is a significant influence between establishing STKIP Muhammadiyah Sorong and the efficacy education Authorized Region in Sorong regency. The second result shows that there is significant correlation between SBM and the efficacy of education in authorized region in Sorong. The third result ideates that there is still significant correlation between management of STKIP Muhammadiyah Sorong and SBM respectively toward the efficacy of education program in Sorong Regency (authorized region).

Keywords: administration PT, school based management, decentralization

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong terhadap Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Populasi yang diamati adalah kalangan civitas akademika STKIP Muhammadiyah Sorong, kepala sekolah dan guru, tokoh masyarakat, dan birokrat, semua dari kabupaten Sorong. Sampel diambil dengan teknik Stratified Random Sampling sejumlah 40 orang. Analisisnya menggunakan korelasi dan regresi sedang teknik pengumpulan data dengan menggunakan penyebaran kuesioner, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan data dilakukan secara kuantitatif melalui tabel frekuensi. Dari hasil penelitian diperoleh, Pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong terhadap Keberhasilan Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong. Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara MBS terhadap Keberhasilan OTDA Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong. Ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong dan MBS secara bersama-sama terhadap keberhasilan OTDA Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong.

Kata Kunci: penyelenggaraan PT, manajemen berbasis sekolah, otonomi daerah

1. Pendahuluan

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya pencapaian tujuan negara, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata di bidang material maupun spiritual dan karenanya pelaksanaan pembangunan haruslah menuju pertumbuhan dan perubahan positif dengan memanfaatkan dan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta adanya usaha menuju pencapaian tingkat hidup yang lebih tinggi.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut maka diperlukan kebijakan publik yang dinamis dalam sistem pemerintahan yang bersifat nasional, undang-undang, peraturan pemerintah, sampai dengan kebijakan publik yang lebih rendah di daerah, agar sumber-sumber potensial khususnya di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna yang membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan berdemokrasi, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa semangat dan nilai-nilai yang lebih sesuai dalam mewujudkan otonomi daerah, antara lain sebagai perwujudan demokrasi, pemerataan peran serta masyarakat serta pengelolaan potensi daerah.

Tiga persoalan mendasar yang perlu diperhatikan dalam menjamin keberhasilan otonomi daerah adalah pertama, komitmen politik pemerintah pusat dan daerah untuk menata kembali hubungan kekuasaan pusat dan daerah; kedua, pengaturan hubungan keuangan didasarkan pada iktikad untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah; ketiga, perubahan perilaku elit politik lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan (*empowerment*) pemerintah agar semakin mandiri dan berkualitas dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah aparatur yang menduduki tampuk pimpinan pemerintahan di daerah tersebut harus mampu mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih penting lagi adalah bagaimana upaya memberdayakan sumber daya manusia sebagai aset pembangunan daerah, oleh karena itu sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah harus telah disiapkan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara maksimal.

Kabupaten Sorong saat ini merupakan daerah pemekaran yang sebelumnya memiliki luas wilayah meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong. Kabupaten sorong memiliki luas wilayah 17.970 kilometer persegi dengan luas lautan 9.214 kilometer persegi dan luas daratan 8.756 kilometer persegi, setelah dimekarkan, maka Kabupaten Sorong mempunyai pusat pemerintahan di Kota Aimas yang merupakan daerah transmigrasi sejak tahun 1980, dengan mayoritas penduduknya berasal dari Jawa.

Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sorong telah menghasilkan berbagai kemajuan cukup berarti, namun demikian masih banyak permasalahan yang mendesak untuk dapat diatasi, yaitu :

- 1) rendahnya kesejahteraan masyarakat yang disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia karena kurang dan atau belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, minimnya sarana dan prasarana terutama infrastruktur ekonomi, terisolasinya daerah, dan belum mantapnya hasil pembangunan yang berdampak terhadap rendahnya produktifitas masyarakat dan sulitnya pemasaran hasil produksi. Disamping itu tidak meratanya persebaran penduduk sebagai *human capital* penggerak roda pembangunan khususnya di wilayah yang memiliki potensi sumberdaya yang cukup besar.
- 2) masih banyaknya distrik dan kampung di Kabupaten Sorong yang terisolir sebagai akibat terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang pembangunan, diantaranya masih terbatasnya kapasitas prasarana jalan dan jembatan, prasarana sosial dan ekonomi yang terkait dengan kelancaran mobilitas manusia, barang, dan jasa.
- 3) lemahnya pemberdayaan ekonomi rakyat di distrik dan kampung karena rendahnya hasil produksi daerah dan belum optimalnya pengembangan investasi khususnya investasi lokal dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi.
- 4) terbatasnya kapasitas daerah dengan kondisi sumber daya alam yang luar biasa namun tidak didukung oleh kualiat sumber daya manusia yang memadai sehingga tidak bisa menghasilkan produksi yang optimal sesuai harapan.
- 5) masih rendahnya kualitas keamanan dan ketertiban umum yang disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.

Mencermati permasalahan tersebut di atas, hal yang sangat mendesak untuk diatasi dalam mempercepat kemajuan otonomi daerah di Kabupaten Sorong adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusianya.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban ini secara bertanggungjawab dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi penduduk daerah yang bersangkutan, maka diperlukan strategi pengelolaan pendidikan yang tepat. Strategi ini diperlukan mengingat sebagian besar daerah mengalami keterbatasan sumber daya, sementara tuntutan kualitas pendidikan selalu meningkat terus sejalan dengan kemajuan perkembangan kehidupan masyarakat dan tuntutan dunia kerja.

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sorong merupakan perguruan tinggi satu-satunya di Kabupaten Sorong memiliki kontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Di usia yang relatif baru (4 tahun) tentunya masih banyak kendala yang harus segera diselesaikan agar penyelenggaraan dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong yang masih sangat perlu mendapat perhatian antara lain relevansi mutu lulusan, dan keterserapan lulusan pada segmen dunia kerja. Disamping itu suasana akademik juga menjadi suatu hal yang harus diciptakan agar terjadi interaksi optimal antara dosen dan mahasiswa, disamping itu penegakan nilai-nilai dan norma akademik, kebebasan mimbar menjadi indikator yang harus diperbaiki.

Manajemen internal dan organisasi STKIP Muhammadiyah Sorong juga menjadi dimensi yang harus dibenahi yang meliputi antara lain : komitmen penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong , peningkatan kerja staf, sistem perencanaan dan penganggaran, pemberian layanan prima, kiat-kiat pengelolaan institusi serta pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Keberlanjutan dana operasional dan upaya memelihara dan mempertahankan sumber daya juga harus diperhatikan secara seksama.

Efisiensi dan produktivitas juga menjadi masalah yang menarik untuk diselesaikan yang antara lain meliputi : penyelesaian studi tepat waktu, minimalisasi angka *drop-out*, peningkatan kualitas mahasiswa baru, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya fisik.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Manajemen Berbasis Sekolah bukan berarti tidak mempunyai masalah di dalamnya, namun masih banyak yang harus dibenahi antara lain : kualitas kepala sekolah selaku pengambil keputusan di sekolah, tanggung jawab yang tersedia sesuai skala prioritas.

Bertitik tolak dari uraian dan permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh :

- 1) Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong terhadap Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong.
- 2) Manajemen Berbasis Sekolah terhadap Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong.
- 3) Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong dan Manajemen Berbasis Sekolah secara bersama-sama terhadap Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara faktual dan akurat mengenai fenomena dan sifat-sifat populasi di daerah tertentu. (Partino 2007:59). Dalam penelitian ini variabelnya adalah Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong (X_1), Manajemen Berbasis Sekolah (X_2), dan Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan (Y) di Kabupaten Sorong.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagian contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sutrisno Hadi (1983:77) berpendapat yang dimaksud dengan sampel adalah “sebagian individu yang diselidiki”. Sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri 40 orang untuk dianalisis dan 10 orang sebagai *try out* dengan memperhatikan kelompok-kelompok latar belakang profesi anggota yang ada, yaitu civitas akademika (10 peserta), Birokrat (10 Peserta), wakil Sekolah (10 peserta) dan tokoh masyarakat (10 peserta)

secara representatif dengan menggunakan teknik pengambilan data *Stratified Sampel*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan metode.

Data yang diperoleh dianalisa dengan teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dimana menggambarkan informasi atau data sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan analisis data secara statistik. Dari hasil pengumpulan data, semua hasil angket diberi skor dan dianalisis menggunakan uji statistik dan teknik korelasi sederhana untuk menentukan hubungan X dan Y, korelasi ganda untuk hubungan variabel X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y dan regresi ganda untuk menentukan kontribusi variabel X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap Y.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mendeskripsikan karakteristik setiap kegiatan penelitian, berikut ini disajikan berturut-turut gambaran lokasi penelitian, karakteristik responden, skor Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong, skor Manajemen Berbasis Sekolah dan Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan.

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Sorong saat ini merupakan daerah pemekaran yang sebelumnya memiliki luas wilayah meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong. Kabupaten sorong memiliki luas wilayah 17.970 kilometer persegi dengan luas lautan 9.214 kilometer persegi dan luas daratan 8.756 kilometer persegi, serta memiliki potensi sumberdaya alam baik daratan maupun lautan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong. Secara administratif, Kabupaten Sorong dibagi menjadi 16 Distrik, 105 Kampung, dan 5 kelurahan.

Penduduk Kabupaten Sorong berjumlah 78.807 jiwa dengan komposisi 53,59% (42.235 jiwa) merupakan penduduk laki-laki, dan 46,41% (36.572 jiwa) merupakan penduduk berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian sex ratio penduduk Kabupaten Sorong adalah 115,48. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 44.061 (55,91%) dari total penduduk. Apabila dilihat dari jenis kelamin penduduk usia produktif, maka ada 23.567 jiwa (53,49%) laki-laki, sedangkan yang perempuan 20.494 (46,51%). Sedangkan penduduk yang non produktif (usia 0-14 dan 65⁺) sekitar 34.746 jiwa atau 44,09% dari total penduduk; terdiri atas 34.020 (97,91%) merupakan penduduk usia 0-14 tahun dan 726 jiwa (2,09%) merupakan penduduk yang usianya 65 tahun ke atas. Sebaran penduduk Kabupaten Sorong yang paling banyak adalah Distrik Salawati dengan penduduk 26.843 jiwa atau sekitar 34,06% dari total penduduk, dengan kepadatan 59,19 jiwa/km² dan Distrik Aimas sebagai pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Sorong mempunyai penduduk 24.695 jiwa atau sekitar 31,34% dari total penduduk dengan tingkat kepadatan mencapai 40,48 jiwa/km².

Sebagai daerah pemekaran baru, infrastruktur pembangunan di daerah ini masih sangat terbatas terutama infrastruktur dibidang pendidikan. Saat ini jenjang pendidikan yang dimiliki adalah pendidikan dasar yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (36) dan Sekolah Dasar (118 sekolah), pendidikan menengah yang terdiri dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (31 sekolah) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (20 sekolah) dan pendidikan tinggi (1 perguruan tinggi).

3.2 Karakteristik Responden

Penulis menetapkan responden sebanyak 40 orang yaitu dari unsur birokrat 10 orang, unsur civitas akademika 10 orang, unsur perwakilan sekolah 10 orang, dan unsur tokoh masyarakat 10 orang. Penjangkaran data dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada responden. Karakteristik responden yang meliputi data tentang usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan tersaji dalam tabel 1.

Pada tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar responden 19 orang (47,5%) berada pada usia 36 – 43 tahun. Pada jenjang usia demikian merupakan usia yang relatif potensial bagi seseorang mengalami kematangan dalam berkarier dan kematangan emosional dalam mengambil keputusan yang tepat tentang sesuatu masalah.

Tabel 1.
Jumlah Responden Menurut Usia

No.	Kategori Usia (tahun)	F	%
1.	20 – 27	5	12.5
2.	28 – 35	5	12.5
3.	36 – 43	19	47.5
4.	44 – 51	4	10
5.	52 – 59	5	12.5
6.	60 – 67	2	5
Jumlah		40	100

Sumber data : Hasil Pengolahan Data Primer

Sedangkan data mengenai tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	F	%
1.	SLTA	7	17.5
2.	D 1	2	5
3.	D 2	10	25
4.	D 3	2	5
5.	S 1	19	47.5
Jumlah		40	100

Sumber data : Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel di atas menunjukkan dua bagian yakni bagian pertama bahwa sebagian responden 10 orang (25%) berpendidikan D2 yang sebagian besar merupakan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di satuan pendidikan. Sedangkan pada bagian kedua terdapat 19 orang (47.5%) berpendidikan S1 yang berasal dari kalangan civitas akademika STKIP Muhammadiyah Sorong dan birokrat Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Sedangkan data mengenai jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Jumlah Responden Menurut Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	F	%
1.	Mahasiswa	4	10
2.	Guru	11	27.5
3.	Kepala Sekolah	2	5
4.	Wiraswasta	3	7.5
5.	Karyawan Swasta	2	5
6.	PNS (bukan guru)	14	35
7.	Dosen	4	10
Jumlah		40	100

Sumber data : Hasil Pengolahan Data Primer

3.3 Deskripsi Data Variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan)

Data variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) mempunyai rentang skor empiris sebesar 32 dari 98 – 66, rata-rata (M) = 85,75, simpangan baku (SD) = 8,381, median (Me) = 86,00, modus = 86 dan varians = 70,244. Banyak kelas yang ditetapkan dalam penelitian ini terdiri dari 7 kelas dengan panjang kelas 5. Untuk mengetahui distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut.

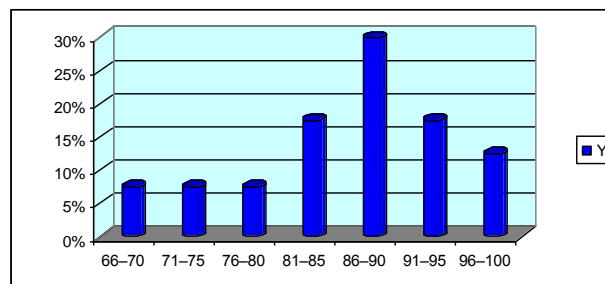
Tabel 4.
Distribusi Frekuensi Skor Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan

No	Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif (%)	Frekuensi Kumulatif (%)
1	66 – 70	3	7,5	5
2	71 – 75	3	7,5	15
3	76 – 80	3	7,5	22,5
4	81 – 85	7	17,5	40
5	86 – 90	12	30	70
6	91 – 95	7	17,5	87,5
7	96 – 100	5	12,5	100
Jumlah		40	100	

Sumber : diolah dari hasil penelitian

Sebanyak 12 (30%) responden berada pada kelompok rata-rata, 12 (30%) responden berada di atas kelompok rata-rata, dan 16 (40%) responden di bawah kelompok rata-rata. Penyajian deskripsi (distribusi) skor secara visual diperlihatkan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 1.
Grafik Frekuensi Variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan)



Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi tersebut, dapat diketahui bahwa variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong) memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi yaitu pada interval 86-90 sebesar 30 %, sedangkan frekuensi Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong yang paling rendah adalah 7,5%.

3.4 Deskripsi Data Variabel X₁ (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong)

Data variabel X₁ (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) mempunyai rentang skor empiris sebesar 30 dari 97 – 67, rata-rata (M) = 86,33 simpangan baku (SD) = 7,803, median (Me) = 87,50, modus = 80 dan varians = 60,892. Banyak kelas yang ditetapkan dalam penelitian ini terdiri dari 7 kelas dengan panjang kelas 5. Untuk mengetahui distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut.

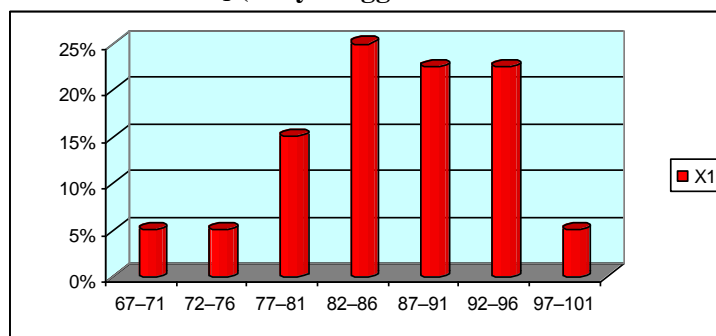
Tabel 5.
Distribusi Frekuensi Skor X_1 (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong)

No.	Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif (%)	Frekuensi Kumulatif (%)
1	67 – 71	2	5	5
2	72 – 76	2	5	10
3	77 – 81	6	15	25
4	82 – 86	10	25	50
5	87 – 91	9	22.5	72.5
6	92 – 96	9	22.5	95
7	97 – 101	2	5	100
Jumlah		40	100	

Sumber : diolah dari hasil penelitian

Sebanyak 10 (25%) responden berada pada kelompok rata-rata, 20 (50%) responden berada di atas kelompok rata-rata, dan 10 (25%) responden di bawah kelompok rata-rata. Penyajian deskripsi (distribusi) skor secara visual diperlihatkan dalam bentuk gambar berikut ini.

Gambar 2.
Grafik Frekuensi Variabel X_1 (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong)



Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi tersebut, dapat diketahui bahwa variabel X_1 (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi yaitu pada interval 82-86 sebesar 25 %, sedangkan frekuensi Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong yang paling rendah adalah 5%.

3.5 Deskripsi Data Variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah)

Data variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) mempunyai rentang skor empiris sebesar 31 dari 99 – 68, rata-rata (M) = 85,28 simpangan baku (SD) = 7,639, median (Me) = 86, modus = 91 dan varians = 58,358. Banyak kelas yang ditetapkan dalam penelitian ini terdiri dari 7 kelas dengan panjang kelas 5. Sedangkan untuk mengetahui distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel berikut.

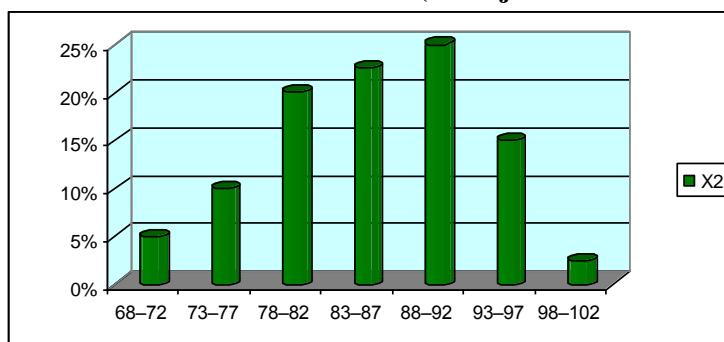
Tabel 6.
Distribusi Frekuensi Skor X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah)

No.	Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif (%)	Frekuensi Kumulatif (%)
1	68 – 72	2	5	5
2	73 – 77	4	10	15
3	78 – 82	8	20	35
4	83 – 87	9	22.5	57.5
5	88 – 92	10	25	82.5
6	93 – 97	6	15	97.5
7	98 – 102	1	2.5	100
Jumlah		40	100	

Sumber : diolah dari hasil penelitian

Sebanyak 10 (25%) responden berada pada kelompok rata-rata, 7 (17,5%) responden berada di atas kelompok rata-rata, dan 23 (57,5%) responden di bawah kelompok rata-rata. Penyajian deskripsi (distribusi) skor secara visual diperlihatkan dalam bentuk gambar berikut ini.

Gambar 3.
Grafik Frekuensi Variabel X₂ (Manajemen Berbasis Sekolah)



Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi tersebut, dapat diketahui bahwa variabel X₂ (Manajemen Berbasis Sekolah) memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi yaitu pada interval 88-92 sebesar 25 %, sedangkan frekuensi Manajemen Berbasis Sekolah yang paling rendah adalah 2,5%.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan analisa regresi linear untuk dua hipotesis pertama dan analisa regresi berganda untuk hipotesis kedua, kemudian dilakukan pengujian dari hasil kedua analisis tersebut dengan tingkat signifikansi 5% dan 1%, maka terbukti bahwa seluruh hasil analisa antara variabel X₁ (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong), variabel X₂ (Manajemen Berbasis Sekolah) dan variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) terbukti saling berhubungan dan dapat dipercaya.

4.1 Pengaruh Variabel X₁ (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) dan Variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan)

Berdasarkan analisa regresi linear pada variabel X₁ (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong), dan variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan), diperoleh gambaran bahwa X₁ (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) berhubungan dan mempunyai pengaruh langsung sebesar 44,2% terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan).

Sedangkan secara tidak langsung berdasarkan analisa korelasi parsial variabel X₁ (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) mampu mempengaruhi variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) sebesar 32,83 % jika variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) dihubungkan dengan variabel X₂ (Manajemen Berbasis Sekolah).

Semua analisa terbukti signifikan dan dapat dipercaya berdasarkan uji t dan uji F pada taraf signifikan 5% dan 1%, hal ini membuktikan bahwa pengaruh variabel X₁ (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) dapat diterima secara linieritas dan keberartian.

Memperhatikan dari hasil hubungan variabel X₁ (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) dan variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) tersebut di atas membuktikan bahwa pengaruh variabel X₁ (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) termasuk dalam kategori kuat ke arah sangat kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong harus ditingkatkan sehingga mampu memberikan Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong sangat berpengaruh terhadap Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong,

karena Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong harus dapat diperkuat dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah secara efektif dan efisien.

4.2 Pengaruh Variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) dan Variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan)

Seperti halnya hipotesa pertama analisa regresi linear pada variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah), dan variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan), diperoleh gambaran bahwa variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) berhubungan dan mempunyai pengaruh langsung sebesar 35,2% terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan).

Jika dilihat dari analisa korelasi parsial hubungan variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) dan variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) secara tidak langsung variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) mampu mempengaruhi variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) sebesar 22,00% jika variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) dihubungkan dengan variabel X_1 (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong).

Semua analisa ini terbukti signifikan dan dapat dipercaya berdasarkan uji t dan uji F pada taraf signifikan 5% dan 1%, hal ini membuktikan bahwa pengaruh variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) dapat diterima secara linieritas dan keberartian.

Memperhatikan dari hasil hubungan variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) dan variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) tersebut di atas membuktikan bahwa pengaruh variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) terhadap Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) masih perlu peningkatan melalui dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, hal ini dibuktikan bahwa pengaruh variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) termasuk dalam kategori sedang ke arah kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah perlu diperbaiki lagi sehingga mampu memberikan dukungan terhadap Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan yang lebih besar.

Oleh karena itu Manajemen Berbasis Sekolah perlu adanya penataan kembali agar pelaksanaannya lebih baik. Sosialisasi baik dari pihak Dewan Pendidikan Kabupaten dan DPRD Kabupaten harus serius dan terus menerus, demikian juga Pemerintah harus memfasilitasi agar Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong menjadi kenyataan.

4.3 Pengaruh Variabel X_1 (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) dan Variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) secara bersama-sama terhadap Variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan)

Berbeda dengan dua hipotesa sebelumnya hipotesa ketiga ini berdasarkan analisa regresi berganda pada variabel X_1 (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) dan variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) secara bersama-sama terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan), diperoleh gambaran bahwa variabel X_1 (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) dan variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) secara bersama-sama berhubungan dan mempunyai pengaruh langsung sebesar 56,5% terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan).

Semua analisa ini terbukti signifikan dan dapat dipercaya berdasarkan uji t dan uji F pada taraf signifikan 5% dan 1%, hal ini membuktikan bahwa pengaruh variabel X_1 (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) dan variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) secara bersama-sama terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) dapat diterima secara linieritas dan keberartian.

Jika memperhatikan hasil dari hubungan variabel X_1 (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) dan variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) secara bersama-sama terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) tersebut di atas membuktikan bahwa pengaruh variabel X_1 (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) dan variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) masih perlu peningkatan, hal ini dibuktikan bahwa pengaruh variabel X_1

(Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) dan variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) termasuk dalam kategori kuat kearah sangat kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong dan Manajemen Berbasis Sekolah diharapkan dapat sejalan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga mampu memberikan Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan yang lebih besar.

Dari hasil analisa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong dan Manajemen Berbasis Sekolah memberikan Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan yang dibutuhkan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kerangka pemikiran bahwa variabel X_1 (Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong) dan variabel X_2 (Manajemen Berbasis Sekolah) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel Y (Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan) sehingga dalam menciptakan Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dibutuhkan Penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong yang diikuti oleh Manajemen Berbasis Sekolah sehingga Keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dapat berjalan dengan baik dan konsisten sesuai dengan yang diharapkan.

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong terhadap keberhasilan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sorong. Adanya pengaruh ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong meningkat atau ditingkatkan, maka peningkatan ini akan diikuti dengan peningkatan keberhasilan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sorong. Artinya semakin efektif penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong, maka akan semakin meningkat keberhasilan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sorong.
- 2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen berbasis sekolah terhadap keberhasilan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sorong. Adanya pengaruh ini menunjukkan bahwa manajemen berbasis sekolah meningkat atau ditingkatkan, maka peningkatan ini akan diikuti dengan peningkatan keberhasilan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sorong. Artinya semakin efektif manajemen berbasis sekolah, maka akan semakin meningkat keberhasilan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sorong.
- 3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong dan manajemen berbasis sekolah secara bersama-sama terhadap keberhasilan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sorong. Adanya pengaruh ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong dan manajemen berbasis sekolah secara bersama-sama meningkat atau ditingkatkan, maka peningkatan ini akan diikuti dengan peningkatan keberhasilan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sorong. Artinya semakin efektif penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong dan manajemen berbasis sekolah secara bersama-sama maka akan semakin meningkat keberhasilan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sorong

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Karena terdapat pengaruh yang signifikan antara penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong terhadap keberhasilan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sorong, maka penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong harus ditingkatkan kualitasnya sebagai bukti pengabdian sebuah perguruan tinggi terhadap anak bangsa di kabupaten Sorong, dan pemerintah daerah kabupaten Sorong hendaknya dapat mendukung dengan cara memberikan bantuan baik moral maupun material kepada STKIP Muhammadiyah Sorong.
- 2) Karena terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen berbasis sekolah terhadap keberhasilan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten Sorong, maka kepala-kepala sekolah, guru-guru, dewan pendidikan Kabupaten Sorong hendaknya lebih serius dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong hendaknya dapat mendukung dengan cara memberikan bantuan baik moral maupun material kepada sekolah-sekolah dalam upaya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

- 3) Mengingat pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat, maka hendaknya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta seluruh masyarakat dapat berperan positif dengan cara memberikan bantuan baik fisik maupun non fisik dalam upaya mendukung penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong dan kepada sekolah-sekolah guna pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali, Haji, (2003). *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisasi sebagai suatu Alternatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adisubrata, Winarnasurya, (2002). *Otonom Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Agustian, Ary Ginanjar, (2005). *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Jakarta: Arga.
- Arikunto, Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Suwaidan, M Thariq dan Basyarahil, U Faishal, 2006. *Mencetak Pemimpin dan Tips Melahirkan Orang Sukses dan Mulia*, Jakarta: Khalifa.
- Fajar, Malik, (2002). *Menggagas Pendidikan Masa Depan*, Malang: UMM Press
- Hadi, Sutrisno, (1983). *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan
- Halwani, Hendra, (2005). *Ekonomi Internasional dan Globalisasi*, Bogor: Galia Indonesia.
- Kasali, Rhenald, (2005). *Change*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koswara, E, (2007). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta: Universitas Satyagama
- Napitupulu, Paimin, (2007). *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni.
- Nurgiyantoro, Burhan, dkk., (2002). *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Partino, H.R. .(2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jogyakarta: Pustaka Mahasiswa
- Peak, Vincent, Norman, (2007). *Prinsip Hidup dan Berfikir Positif*, Jakarta: Media Abadi.
- Sugiyono, (2006). *Statistik untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Suryosubroto, B, (2004). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh, Mario, (2005). *Becoming a Star*, Bandung: Syamil Cipta Media.
- Triton, PB, (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan Nasional RI Jakarta Tahun 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman Husaini, 2008. *Manajemen Teori Praktik Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Dersal, r. William, 1987. *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Supervisi Dalam Pemerintahan dan Perusahaan*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Widjaya, AW, (1998). *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.